

# S U A R

Jurnal Dewan Riset Daerah Jawa Tengah

Volume IV, No. 1 Edisi September, 2008



## Kemiskinan dan Lingkungan

ISSN 1858-1331

Pustaka  
**DRD**  
JATENG

**Penanggung Jawab :**  
Gubernur  
Propinsi Jawa Tengah

**Ketua Dewan Redaksi :**  
Siti Fatimah

**Dewan Redaksi :**  
Djoko Suprpto  
Nugroho  
Agus Suranta  
Nuniek Sriyuningsih  
Budi Widianarko  
Daniel Daud Kameo  
Slamet Imam Wahyudi  
Fatimah Amin Syukur  
Mudjahirin Thohir

**Redaktur Pelaksana :**  
Slamet Imam Wahyudi  
Muhammad Tamzil

**Sekretaris Redaksi :**  
A. Dono Widjanarko  
Bayu Agus Widagdo  
Teguh Wiyono

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI

#### WACANA PEMBUKA

- Surat dari Redaksi – Ketua DRD Jateng ..... 2

#### WACANA UTAMA

- **Lesson Learned : Kabupaten Purbalingga Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia**  
Prof. dr. Siti Fatimah-Muis, SPGK, Ir, MG. Nuniek Sriyuningsih, MSi, Dra. Rodhiyah, SU, Teguh Wiyono, S.Sos ..... 3
- **Merencanakan Pembiayaan Pendidikan Di Jawa Tengah**  
Dr. Nugroho, MPSi, Drs. Yeri Sutopo, MT, Adiyati Utami, SE.MM ..... 17
- **Memahami Kemiskinan**  
Mudjahirin Thohir ..... 23
- **Community Development**  
Mudjahirin Thohir ..... 28
- **Zonasi Kawasan Lindung Abadi Dengan Pendekatan Geographic Information Systems (GIS) Di Kabupaten Jepara**  
Melulosa A.S, S.Y Jatmiko, Maryana ..... 31
- **Model Pengembangan Dan Penataan Ruang Kawasan Pesisir Rawan Abrasi**  
Melulosa A.S, S.Y Jatmiko, S. Imam Wahyudi ..... 38

## LESSON LEARNED KABUPATEN PURBALINGGA DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Prof. dr. Siti Fatimah-Muis, SpGK,  
Ir. MG. Nuniek Sriyuningsih, MS,  
Dra. Rodhiyah, SU  
Teguh Wiyono, S.Sos

Pembangunan Nasional Indonesia telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun juga mengandung berbagai permasalahan yang mendesak untuk dipecahkan. Pembangunan masa lalu yang lebih menekankan kepada tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, telah menciptakan peningkatan pendapatan perkapita, penurunan jumlah kemiskinan dan pengangguran, dan perbaikan kualitas hidup manusia secara rata-rata. Namun demikian hasil pembangunan yang dicapai disertai dampak negatif dalam bentuk kesenjangan antar golongan pendapatan, antar wilayah, dan antar kelompok masyarakat. Krisis ekonomi membawa Indonesia memasuki era reformasi yakni era demokratisasi di berbagai bidang serta munculnya otonomi daerah. Namun demikian euforia demokrasi ternyata disertai dengan krisis multi sektor yang menyebabkan *set-back* di bidang pembangunan di seluruh Indonesia. Terjadi erosi dan kelumpuhan berbagai sistem dan lembaga strategis di atas telah menghasilkan kondisi yang rapuh serta sangat rawan terhadap guncangan, baik dari dalam negeri maupun dari dunia internasional akibat pesatnya arus globalisasi. Krisis ekonomi tahun 1997-1998 telah memberikan pelajaran yang sangat mahal namun berharga bagi bangsa Indonesia. Krisis telah memaksa Indonesia melakukan perubahan yang perlu dilakukan dalam rangka koreksi kelemahan dan kesalahan masa lalu. Ekonomi, politik, sosial dan hukum mengalami transformasi dan reformasi menuju kepada suatu sistem baru yang diharapkan akan lebih berkeadilan, handal, dan berkelanjutan. Berkaca dari pelajaran masa lalu tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan tiga agenda pembangunan yaitu:

1. Menciptakan Indonesia yang aman dan damai,
2. Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis, serta
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Khusus terkait agenda yang ketiga, prioritas pembangunan dan arah kebijakannya adalah sebagai berikut: penang-gulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, peningkatan investasi, revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, pembangunan perdesaan dan pengurangan ketimpangan antar wilayah, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, pembangunan kependudukan yang berkualitas, dan percepatan pembangunan infrastruktur.

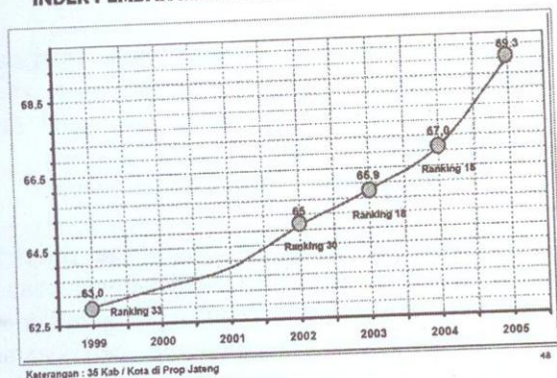
Menyikapi kondisi tersebut beberapa kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan, pembangunan di Kabupaten Purbalingga difokuskan pada empat pilar pembangunan yaitu : pilar pembangunan pendidikan dan agama, pilar pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial, pilar pembangunan ekonomi kerakyatan, dan pilar pembangunan perdesaan, yang didukung oleh sektor-sektor pembangunan lainnya secara sinergis dan terpadu, dengan landasan keimanan dan ketakwaan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, serta jati diri masyarakat Purbalingga yang *cablaka/terbuka dan berbudaya*.

Kerja keras Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat pada pembangunan berbagai bidang, ternyata telah menampakkan hasil dalam upaya masyarakat Purbalingga meng-

gapai kesejahteraannya. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan Angka *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga. IPM adalah tolok ukur keberhasilan pembangunan manusia yang dinilai dari tiga aspek utama yaitu aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek ekonomi.

Gambar 1.

INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA KAB. PURBALINGGA



Prestasi Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan Index Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dari peringkat 33 menjadi urutan 15 di tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun merupakan sebuah contoh yang dapat dijadikan pelajaran (*lesson learned*) bagi kabupaten/kota yang lain. Naskah ini dibuat untuk me-nyajikan upaya-upaya/kiat-kiat yang telah dilakukan oleh Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan HDI.

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

Mengacu kepada hasil analisis yang dilaksanakan Pemkab, maka masalah pokok pembangunan di daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengangguran → Kemiskinan



Derajat Hidup Masyarakat Rendah:

- Rendahnya Kecukupan Pangan Bergizi
- Rendahnya Kecukupan Papan Yang Layak
- Rendahnya Derajat Kesehatan
- Rendahnya Derajat Pendidikan
- Rendahnya Pendapatan per Kapita dan Daya Beli

2. Pertumbuhan Ekonomi yang masih seret.
3. Kesenjangan pembangunan antar wilayah.
4. Sumber Pembiayaan Pembangunan Terbatas
5. Kualitas SDM dan Moralitas yang relatif masih rendah

Untuk menghadapi masalah yang telah diidentifikasi, maka disusun suatu kebijakan pembangunan di bidang kesra, di mana kesehatan merupakan salah satu dari 4 pilar pembangunan (Gambar 2).

Gambar 2.



Suber:

Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama-sama dengan seluruh masyarakat telah menyepakati "**Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia**", sebagai visi yang harus dicapai. Visi tersebut adalah hasil pendapatan yang harmonis antara kewenangan yang dimiliki, potensi yang tersedia dan isu serta tantangan pembangunan yang dihadapi. Visi ini sangat diyakini dapat dijadikan sebagai pemandu arah dan pemicu semangat dalam mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan Purbalingga.

Untuk mewujudkan "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia" telah dirumuskan strategi dan langkah yang diharapkan dapat dilaksanakan untuk mewujudkannya. Strategi yang ditempuh diletakkan dalam bingkai ruh dan spirit otonomi daerah yang menuntut penanganan prima atas berbagai persoalan mendesak, dan mendorong

peningkatan peri kehidupan manusia "sinergy in harmony" pada terwujudnya kesejahteraan.

Kesejahteraan yang ditunjukkan pada peningkatan holistik-multidimensional aspek lahiriah dan b... bang dan proporsional lain adalah terpenuh... manusia yang meliputi... papan, kesehatan dan... kebutuhan yang lebih b... ketentraman, kesemp... ibadah, serta kesemp... mengaktualisasikan diri...

Sebagai sasaran a... Purbalingga, telah di... yang harus diamban... segenap komponen... pembangunan.

Delapan mission berikut :

1. Menyelenggara... efisien, efektif... dengan meng... da masyarakat...
2. Melakukan p... dap kecukup... sia khususny... masyarakat... krisis ekono...
3. Meningkatkan... SDM yang... hadirat Tuh... derajat ke... pembangu...
4. Meningkatkan... mian raky... sungguh-s... mi raky... arti luas),... an dan j... uangan, dengan...
5. Mewuju... perdesa... untuk k... melalui...
6. Mening... ketepat... an me... untuk... ciptaa...

mi yang masih  
pangunan antar  
Pembangunan Ter-  
ralitas yang relatif

yang telah diiden-  
u kebijakan pem-  
i mana kesehatan  
ri 4 pilar pem-



Purbalingga ber-  
masyarakat telah  
**yang Mandiri**  
**Menuju Masya-**  
**g Berakhlak**  
rus dicapai. Visi  
patan yang har-  
yang dimiliki,  
serta tantangan  
Visi ini sangat  
ni pemandu arah  
m mengangkat  
hartaan masya-  
ga.  
balingga yang  
Saing Menuju  
erakhlak Mulia”  
langkah yang  
n untuk mewu-  
puph diletakkan  
tonomi daerah  
prima atas  
dan mendorong

peningkatan peri kehidupan masyarakat dalam nuansa “*sinergy in harmony*” yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan yang ingin dicapai berintikan pada peningkatan kualitas hidup yang *holistik-multidimensional* dan mencakup aspek-aspek lahiriah dan batiniah secara seimbang dan proporsional. Indikatornya antara lain adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan, serta kebutuhan yang lebih bersifat batiniah seperti ketentraman, kesempatan dan kebebasan beribadah, serta kesempatan berekspresi dan mengaktualisasikan diri.

Sebagai sasaran antara pencapaian visi Purbalingga, telah ditetapkan delapan misi yang harus diemban oleh pemerintah dan segenap komponen masyarakat dalam pembangunan.

Delapan *mission* tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
2. Melakukan pemulihan (*recovery*) terhadap kecukupan kebutuhan pokok manusia khususnya pangan dan papan, selagi masyarakat masih merasakan dampak krisis ekonomi dan kemiskinan.
3. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas SDM yang beriman dan bertakwa ke hadirat Tuhan YME, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya pertanian (dalam arti luas), kerajinan, industri, perdagangan dan jasa, pembenahan lembaga keuangan, serta pariwisata yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.
5. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya melalui gerakan masyarakat.
6. Meningkatkan sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

7. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam proses pembangunan dengan mengimplementasikan paradigma masyarakat membangun.
8. Memantapkan paham kebangsaan dan mendorong berkembangnya kehidupan beragama guna mewujudkan rasa aman dan ketentraman masyarakat.

## KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN

Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan :

- Menjadikan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai *learning organization*/organisasi pembelajaran yang meliputi 5 (lima) unsur, yaitu pengembangan *master personal*, *share vision*, mental model, *tim learning* dan sistem *thinking*.
- Mengupayakan perubahan/charge secara bertahap dan tiga agenda besar, yakni agenda intelektual (visi, misi dan kerangka strategis), agenda managerial (struktur, jejaring kerja, sistem, teknologi dan pendayagunaan sumber daya manusia), dan agenda behavioral (etika, moral, gaya kepemimpinan, ketrampilan, daya saing, kepastian, penghargaan).
- Internalisasi dan pelaksanaan 10 prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik/*good governance* serta dengan memperhatikan penetrasi global (demokratisasi, HAM, perdagangan bebas dan LH).
- Keberpihakan kepada masyarakat lemah /miskin dan pengembangan pemberdayaan masyarakat.
- Pengembangan *net working*/jejaring kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.
- Kemudahan pelayanan publik yang antara lain bernilai kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan Kenyamanan.

Kebijakan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi: 1) pemulihan kecukupan kebutuhan pokok

manusia utamanya pangan dan papan; 2) penegakan dan pelaksanaan empat pilar pembangunan secara konsisten dan sinergis; dan 3) pembangunan sektor-sektor lain untuk menopang keberhasilan pencapaian misi pembangunan. Empat pilar utama pembangunan yang ditegaskan dalam pencapaian visi Purbalingga meliputi:

- Pilar pembangunan pendidikan dan agama
- Pilar pembangunan kesehatan
- Pilar pembangunan ekonomi kerakyatan, dan
- Pilar pembangunan perdesaan

### PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Untuk meletakkan landasan yang kukuh baik tegaknya pilar-pilar pembangunan, pemerintah melakukan upaya pemulihan (*recovery*), kecukupan dan ketersediaan kebutuhan pokok manusia, khususnya pangan dan papan. Kebijakan ini sekaligus juga bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Beberapa program terobosan/inovasi lokal yang dilaksanakan dalam rangka pemulihan ketersediaan kebutuhan pokok pangan dan papan antara lain :

- Program Padat Karya Pangan
- Program Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah, dan
- Program Stimulan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin.

Padat Karya Pangan merupakan replikasi dari kegiatan *Food for Work*. Program ini didesain untuk melengkapi program nasional dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin melalui Program Beras untuk Masyarakat Miskin/Raskin. PKP adalah kegiatan pembangunan prasarana fisik desa yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan bahan pangan beras sebagai upah kerja. Pelaksanaan program ini menggunakan pendekatan *pro poor*, *participatoris*, dan menekankan penumbuhan keswadayaan masyarakat. PKP memiliki sinergitas yang kuat dalam rangka menumbuhkan budaya gotong royong, menyediakan lapangan kerja sementara, meningkatkan sarana dan prasarana fisik dasar desa, memanfaatkan material lokal, dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengamanan harga dasar gabah.

Program Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah adalah program pemberian makanan tambahan kepada siswa sekolah dasar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan siswa terutama bagi siswa yang mengalami dan menunjukkan gejala kekurangan energi dan protein (menderita gizi kurang dan gizi buruk), utamanya siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Upaya pemenuhan kebutuhan rumah/papan yang layak huni bagi keluarga miskin dilaksanakan melalui Program Stimulan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin/PSPRGakin. Program ini adalah pemberian bantuan dana stimulan untuk menumbuhkan keberdayaan dan kegotongroyongan masyarakat sebagai jati diri bangsa, melalui pemugaran rumah sehingga layak huni dan sehat. Tujuannya adalah untuk percepatan upaya pengurangan kemiskinan melalui peningkatan swadaya, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, peningkatan kapasitas penduduk miskin dan pelestarian nilai budaya kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat.

Sejak pertama kali dicanangkan pada tahun 2003, sampai saat ini telah berhasil direhab sebanyak 7.311 rumah keluarga miskin yang tidak layak huni, menjadi rumah tempat tinggal yang layak huni dan sehat. Jumlah anggaran yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 18.57 milyar yang terdiri dari dana APBD Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 11,25 milyar dan swadaya masyarakat sebesar 7,32 milyar.

Selain program-program diatas, dilaksanakan pula program yang juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Antara lain; program bantuan makanan untuk penderita gizi buruk kurang dan gizi buruk, program pengembangan lumbung pangan masyarakat desa/LPMD, dan program ketahanan pangan yang mantap.

### PILAR PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN AGAMA

Pembangunan bidang pendidikan diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas intelektual dan ketrampilan masyarakat. Kebijakan utama pembangunan pendidikan di Purbalingga meliputi: 1). Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, 2). Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan

dan 3). Penyele *accountable* dan

Dalam rangka masyarakat terh yang berkualitas, gram utama pem yaitu:

- Penyediaan, sarana prasar
- Penyediaan, mutu tenaga pemenuhan k peningkatan an; dan peni pendidikan.

an untuk Anak  
 erian makanan  
 sekolah dasar.  
 gkatkan derajat  
 gi siswa yang  
 n gejala keku-  
 (menderita gizi  
 nya siswa yang  
 mpu.

uhan rumah/  
 keluarga miskin  
 am Stimulan  
 Miskin/PSPR-  
 erian bantuan  
 hkan keberda-  
 asyarakat seba-  
 ngaran rumah  
 at. Tujuannya  
 paya penang-  
 peningkatan  
 serta masya-  
 ingkatan kapa-  
 elestarian nilai  
 keswadayaan

an pada tahun  
 erhasil direhab  
 a miskin yang  
 umah tempat  
 sehat. Jumlah  
 n sebesar Rp.  
 dana APBD  
 r Rp. 11,25  
 sebesar 7,32

as, dilaksana-  
 rtujuan untuk  
 nusia. Antara  
 n untuk pen-  
 i buruk, pro-  
 angan masya-  
 m ketahanan

**PENDIDIKAN**

an diarahkan  
 as intelektual  
 ijakan utama  
 Purbalingga  
 masyarakat  
 kualitas, 2).  
 i pendidikan

dan 3). Penyelenggaraan pendidikan yang *accountable* dan transparan.

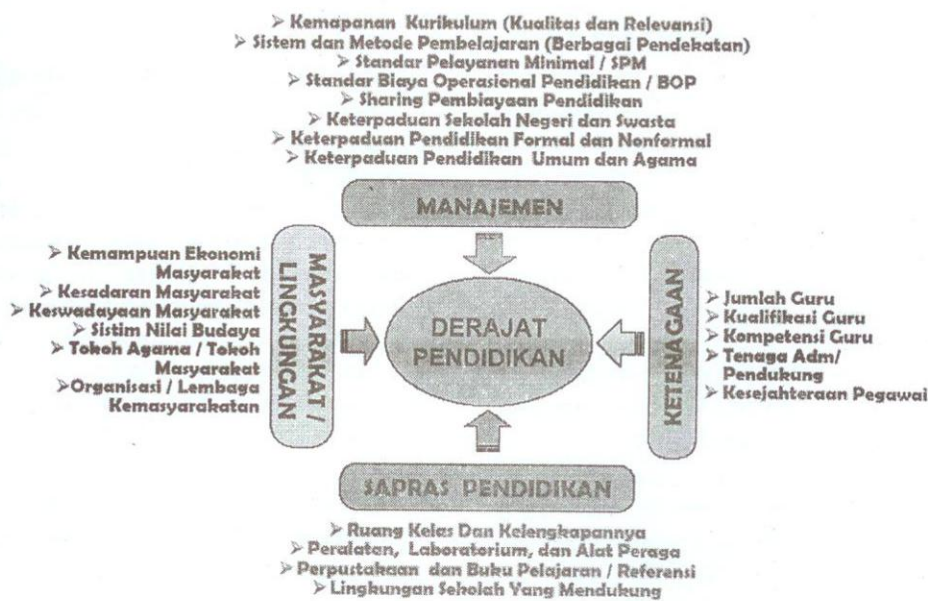
Dalam rangka peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas, telah dikembangkan 4 program utama pembangunan bidang pendidikan, yaitu:

- Penyediaan, perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan.
- Penyediaan, pemerataan dan peningkatan mutu tenaga pendidikan yang meliputi; pemenuhan kebutuhan tenaga pendidikan; peningkatan kompetensi tenaga pendidikan; dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikan.

- Penyediaan dan peningkatan biaya operasional sekolah sesuai standard.
- Pembinaan manajemen dan sistem penyelenggaraan pendidikan.

Khusus untuk meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas, pemerintah melakukan pembinaan pengelolaan bantuan operasional pendidikan/sekolah, peningkatan efektivitas program beasiswa dan GN-OTA, serta pengembangan manajemen berbasis sekolah

**Gambar 3.**  
**STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN**



**Tabel 1.**  
**KONDISI PRASARANA KESEHATAN**

JENJANG SEKOLAH	JUMLAH SEKOLAH			KONDISI RUANG KELAS			
	NEGERI	SWASTA	JML	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH R. KELAS
TK/BA/RA	1	175	176	202	134	104	440
SD	465	2	467	1.131	1.251	825	3.207
MI*	2	179	181	800	141	144	1.085
SMP	66**	15	81	729	21	57	707
MTs	2	31	33	153	21	24	198
SMA	9	8	17	170	35	8	213
MA	1	3	4	16	4	1	21
SMK	5	15	20	145	20	4	169
JUMLAH	549	428	977	3.186	1.493	1.063	5.642

\* SUMBER DATA DEPAG PURBALINGGA  
 \*\* 43 SMP NEGERI, 23 SMP TERBUKA, DAN 1 SMP SATU ATAP

Tabel 2.  
KONDISI TENAGA PENDIDIK/GURU

JENJANG SEKOLAH	JML GURU	GURU BERDASAR LIAJAH			GURU BERDASARKAN STATUS					
		≤ D1	D2+D3	≥ S1	PNS PER GOL				NON PNS	
					II	III	IV	JML		
TK	318	230	70	18	17	42	2	61	257	
SD	4.485	778	3.168	539	476	2.372	912	3.760	725	
MI	1.559	357	709	493	41	331	156	528	1.031	
SMP	1.505	196	217	1.092	0	774	189	963	542	
MTs	537	46	248	243	3	75	39	117	420	
SMA	447	1	53	393	0	140	104	224	223	
MA	97	4	16	77	0	19	10	29	68	
SMK	495	15	106	374	0	27	54	81	414	
JUMLAH	9.125	1.397	4.517	3.211	520	3.738	1.464	5.702	3.423	
		5.914								
		64,81 %								

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purbalingga

### PILAR PEMBANGUNAN KESEHATAN

Dalam upaya akselerasi pencapaian "Kabupaten Purbalingga Sehat Tahun 2010" yang dicerminkan suatu kondisi dimana masyarakatnya berperilaku sehat, dilindungi oleh lingkungan yang sehat, serta mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan mudah, pencapaiannya ditempuh melalui kebijakan :

#### Membangun kemandirian masyarakat melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).

Program ini merupakan inovasi daerah untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan paripurna melalui prinsip penyelenggaraan dengan kendali mutu dan kendali biaya, dan yang lebih penting adalah untuk menarik partisipasi masyarakat dalam pembiayaan kesehatan dan mewujudkan keberdayaan masyarakat melalui terjaminnya pemeliharaan/perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

Jumlah kepesertaan JPKM sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 berturut-turut adalah 67.342 KK; 100.797 KK; 123.292 KK; dan 161.264 KK (dari 210.000 KK/72%) yang terbagi ke dalam kategori: strata i/keluarga miskin yang premi ditanggung penuh oleh pemerintah; strata ii/keluarga paska gakin yang diwajibkan membayar separo; strata iii/ keluarga mampu yang harus membayar premi secara penuh.

#### Perwujudan Desa Sehat Mandiri

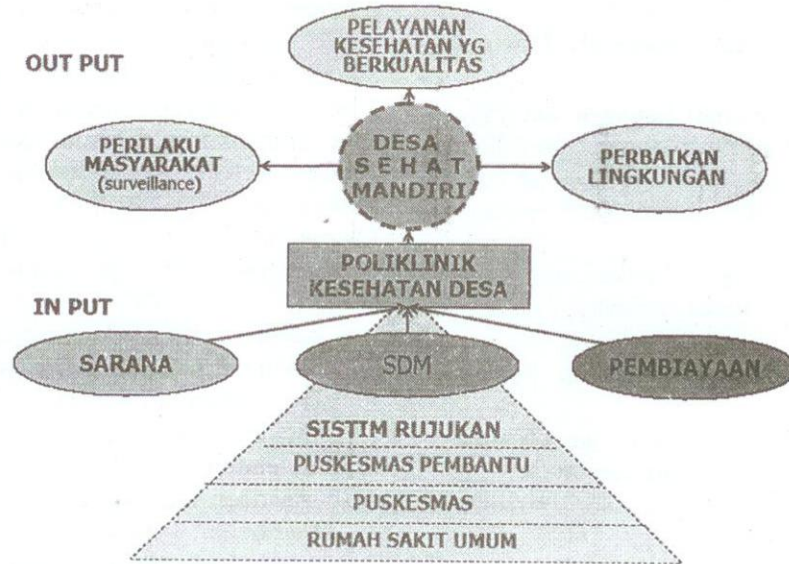
Membangun pemberdayaan masyarakat melalui perwujudan desa sehat mandiri yang diorientasikan agar setiap desa mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, merumuskan pokok permasalahan kesehatan, dan sekaligus mampu merencanakan alternatif pemecahan permasalahan; serta sikap yang responsif dan antisipatif terhadap adanya wabah penyakit, kejadian luar biasa, serta bencana alam. Untuk itu disusun Instrumen Perwujudan Desa Sehat Mandiri (Gambar 4).

#### Pelaksanaan Keterpaduan Program - program Pokok Kesehatan Untuk Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan .

##### a. Program Penyehatan Lingkungan.

Kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang meliputi lingkungan rumah, lingkungan tempat kerja, lingkungan sekolah, tempat ibadah, dan tempat-tempat umum lainnya. upaya yang dilakukan untuk menurunkan resiko lingkungan sebagai media dalam penularan penyakit dilaksanakan melalui berbagai gerakan kebersihan lingkungan, peberantasan vektor malaria dan demam berdarah, peningkatan cakupan spal, jamban keluarga, cakupan air bersih, dan cakupan sanitasi dengan berbasis masyarakat.

**Gambar 4.**  
**INSTRUMEN PERWUJUDAN DESA SEHAT MANDIRI**



- b. Program Pemasyarakatan /Pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Perwujudan Purbalingga sehat harus didukung oleh budaya perilaku bersih dan sehat bagi masyarakatnya, oleh karena itu, secara berkesinambungan telah dilaksanakan gerakan masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat. kegiatan promotif yang dilakukan dalam pembudayaan PHBS dilakukan melalui gerakan cuci tangan/gosok gigi bersama, pembuatan poster dan baliho, pengenalan phbs di sekolah dasar, dan melalui berbagai media lainnya.

- c. Program Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas

Dari Sisi Supply :

- Peningkatan kompetensi SDM kesehatan melalui diklat teknis sesuai dengan kebutuhan, seperti *life saving skills*; kegawatdaruratan; poned; ponek; ctu; mtbs; apn; survailen; dan dokter keluarga.
- Peningkatan kapasitas manajemen kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan input (sarana, prasarana, obat, alat kesehatan, bahan & sediaan farmasi),
- Peningkatan proses pelayanan kesehatan melalui program penjaminan mutu dan akreditasi UPTD/puskemas (dari 23 puskesmas telah terakreditasi 8 puskesmas).
- Seluruh lembaga kesehatan dalam pelaksanaan tugasnya telah mengacu pada

standar pelayanan minimal/spm bidang kesehatan.

Dari Sisi Demand :

- Telah dibentuk badan peduli kesehatan masyarakat (BPKM) di tingkat kecamatan dan unit pengaduan masyarakat di setiap institusi pelayanan. Tujuannya adalah agar masyarakat peduli terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.
- d. Program Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.
- Upaya mewujudkan penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana (KB)/ kesehatan reproduksi yang bermutu dan berkesinambungan dilaksanakan melalui:
- Pelayanan konseling kontrasepsi bagi calon peserta dan peserta KB.
  - Pemenuhan kebutuhan dan per-mintaan PUS terhadap pelayanan kontrasepsi yang berkualitas.
  - Pelayanan kesehatan reproduksi remaja melalui komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan konseling kesehatan reproduksi bagi remaja di institusi pendidikan formal umum dan ber-basiskan agama setingkat SLTP dan SLTA, Pesantren dan pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja
  - Pengembangan kualitas keluarga
  - Pelayanan data dan informasi keluarga, melalui penyediaan data dan informasi keluarga dan penduduk yang lengkap

- Pelayanan advokasi dan komunikasi informasi edukasi (KIE) program KB.

### **Program Penanganan Masalah Darurat Kesehatan.**

Peningkatan pelayanan kegawat daruratan diprioritaskan pada pertolongan persalinan melalui peningkatan ketersediaan sarana kesehatan dan peningkatan kemampuan petugas pelayanan gawat darurat.

Beberapa indikator yang digunakan antar lain:

- Meningkatnya angka persalinan ditolong oleh nakes
- Meningkatnya akses terhadap ketersediaan darah
- Tersedianya komponen yang aman untuk rujukan bumil dan neonatus
- Meningkatnya ibu hamil resti/komplikasi yang ditangani
- Meningkatnya neonatal resti/komplikasi yang ditangani

### **PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN**

Pengelolaan kewenangan dan potensi daerah diarahkan pada pemulihan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah secara berkelanjutan. Kebijakan yang ditempuh adalah dengan menciptakan iklim yang sehat dan kondusif yang memungkinkan dan mampu mendukung tumbuhnya lapangan usaha baru, dan meluasnya kesempatan berusaha baru dan berkembangnya lapangan usaha yang telah ada. Sehingga diharapkan pada akhirnya akan mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi rakyat.

Penciptaan iklim kondusif sangat terkait dengan keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan yang dimiliki pemerintah. Dana APBD lebih diutamakan sebagai stimulan atau "oli pelumas" dalam mendorong berkembangnya dunia usaha dan investasi untuk tumbuh kembangnya perekonomian rakyat di daerah. Sehingga diharapkan sektor-sektor non pemerintah atau swasta nasional maupun asing yang mempunyai kemampuan keuangan seperti modal perorangan, modal dunia usaha (PMDN dan PMA), modal ventura, kredit

perbankan, dan modal dari lembaga-lembaga donor baik dalam maupun luar negeri akan tertarik untuk berinvestasi dalam berbagai bidang usaha.

Peningkatan investasi menjadi sangat penting, karena investasi tidak hanya berarti penambahan modal saja, akan tetapi investasi akan terkait pula dengan pengembangan teknologi, perluasan pasar dan jaringan kerja/*net working* yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan kegiatan perekonomian.

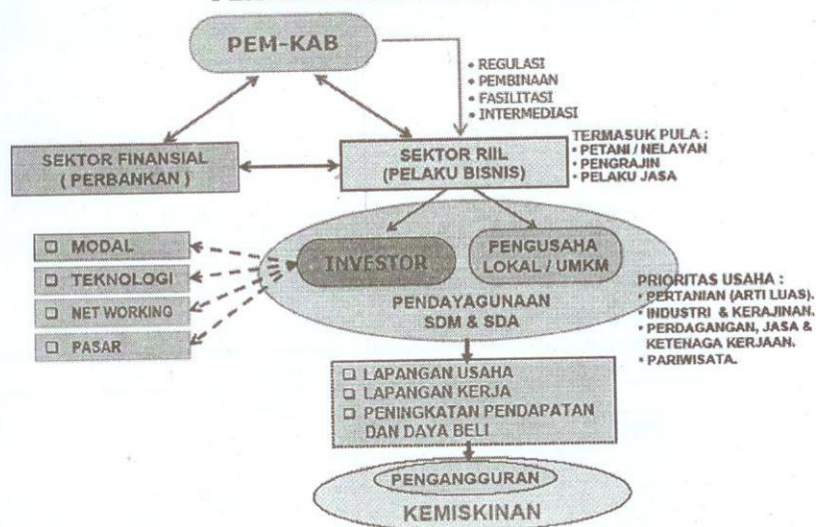
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga terus mengembangkan forum dialog antara Pemerintah Daerah, Pelaku Bisnis dan Sektor Finansial/Perbankan dalam pembahasan tataran kebijakan dan evaluasi pelaksanaan secara berkala.

Pemberian kesempatan bekerja dan berusaha lebih diprioritaskan untuk diberikan kepada masyarakat golongan ekonomi yang masih lemah. Tetapi tentu saja dengan tetap membuka peluang dan kesempatan bagi pelaku dan masyarakat ekonomi kuat untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam pembangunan ekonomi Purbalingga dalam suatu bentuk kemitraan yang sehat. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah fasilitasi bagi masuknya para pelaku usaha ke Purbalingga dalam koridor upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Strategi pembangunan ekonomi kerakyatan difokuskan pada upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita serta peningkatan daya beli masyarakat. Secara garis besar, strategi pembangunan ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Purbalingga adalah : 1) peningkatan produksi dan produktivitas usaha pertanian dalam usaha luas, 2) pengembangan dan peningkatan produksi dan produktivitas usaha kecil, menengah dan koperasi di sektor pertanian, kerajinan, industri, perdagangan dan jasa, 3) pengembangan pariwisata daerah sebagai prime mover sektor-sektor pembangunan lain-lain dan 4) pembenahan lembaga-lembaga keuangan daerah.

**A. HASIL  
PENDIDIK**  
Keberhasi  
didikan meng

**Gambar 5.**  
**STRATEGI PEMBANGUNAN DALAM MENDORONG**  
**PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH**



**A. HASIL PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN**

Keberhasilan pembangunan di bidang Pendidikan mengacu kepada beberapa parameter

yang telah disusun oleh bidang yang bersangkutan. Tabel 3 menyajikan hasil tersebut dibandingkan dengan nilai Standar Pencapaian Minimal (SPM) nasional

**Tabel 3.**  
**CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA**  
**BIDANG PENDIDIKAN**

INDIKATOR	CAPAIAN PURBALINGGA		SPM NAS 2009
	2001	2005	
• ANGKA MELEK HURUF	85,80	92,80	95,00
• RATA-RATA LAMA SEKOLAH	5,60	6,40	-
• ANGKA PARTISIPASI KASAR SD	109,39	111,62	114,9
• ANGKA PARTISIPASI KASAR SLTP	77,21	96,69	95,72
• ANGKA PARTISIPASI KASAR SM	35,50	34,87	64,91
• ANGKA PARTISIPASI MURNI SD	90,90	91,42	93,52
• ANGKA PARTISIPASI MURNI SLTP	55,6	77,7	73,64
• ANGKA PARTISIPASI MURNI SM	32,38	32,94	53,40
• ANGKA MELANJUTKAN KE SLTP	75,5	81,36	94,00
• ANGKA MELANJUTKAN KE SM	50,32	56,06	86,92
• ANGKA PUTUS SEKOLAH SD	0,33	0,28	2,09
• ANGKA PUTUS SEKOLAH SLTP	0,97	0,60	1,65
• ANGKA PUTUS SEKOLAH SM	3,99	1,25	2,85
• ANGKA MENGULANG KELAS SD	5,65	5,10	1,76
• ANGKA MENGULANG KELAS SLTP	0,17	0,17	0,34
• ANGKA MENGULANG KELAS SM	0,39	0,36	0,20

**Tabel 4.**  
**FIGUR ANGGARAN PEMBANGUNAN DI PURBALINGGA APBD TAHUN 2007**

NO.	BIDANG	TOTAL BELANJA		BELANJA LANGSUNG	
		Rp.	%	Rp.	%
1	Pendidikan	255.256.627.000	40.67	59.249.428.000	19.09
2	Kesehatan	83.250.351.000	13.26	52.113.420.000	16.79
3	Ekonomi	47.692.078.000	7.59	29.740.816.000	9.58
4	Pembangunan Perdesaan	38.070.179.000	6.06	36.943.420.000	11.90
5	Infrastruktur	71.985.967.000	11.46	64.625.118.000	20.82
6	Pemerintahan Umum	131.763.587.000	20.98	67.657.268.000	21.80
	Jumlah	628.018.789.000	100	310.329.470.000	100

**Tabel 5.**  
**PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2006**

PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	TAHUN 2006 (DALAM RIBUAN RUPIAH)						
	APBD KAB			APBD PROP		APBN	JUMLAH
	BLJ TIDAK LANGSUNG (RUTIN)	BELANJA LANGSUNG (PEMBANG)	JUMLAH	SEKTOR	IN-GUB		
1	2	3	4=(2+3)	5	6	7	8=(4+5+6+7)
1. SARPRAS PENDIDIKN	332.167	18.716.762	17.048.929	1.700.000	2.510.000	1.585.000	22.603.929
2. KETENAGAAN	187.880.850	372.403	188.253.350	2.408.250	-	8.843.892	172.514.596
3. BIAYA OPERASIONAL	6.754.214	10.470.735	17.507.452	180.250	-	20.071.050	37.857.781
4. SISTEM / MANAJEMEN	-	511.507	511.507	-	-	-	511.507
JML ANG PENDIDIKAN	174.967.437	28.071.407	203.038.844	4.358.500	2.510.000	28.499.551	238.406.895
TOTAL APBD KAB.	362.158.837	137.987.005	500.145.703	6.868.500			
PROSENTASE	40,31%	20,34%	40,60%				

**Tabel 6.**  
**PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2006**

BELANJA LANGSUNG	APBD KAB	APBD PROP	APBN	TOTAL
TOTAL ANG PENDIDIKAN	203.038.844	6.868.500	28.499.551	238.406.895
PROSENTASE	85.16 %	2.88 %	11.95 %	100.00 %
SARANA PRASARANA	16.716.762	4.270.000	1.585.000	22.571.627
PROSENTASE	74.66 %	18.92 %	7.02 %	100.00 %

### B. HASIL PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN

Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan mengacu kepada beberapa parameter yang telah disusun oleh bidang yang

bersangkutan. Tabel 6 menyajikan hasil tersebut dibandingkan dengan nilai Standar

C. HASIL EKONOMI  
Keberhasilan  
Perekonomian

SIMPULAN  
Menganalisis  
disajikan  
seorang s

JUN 2007

LANGSUNG	
	%
8.000	19.09
0.000	16.79
5.000	9.58
0.000	11.90
8.000	20.82
8.000	21.80
0.000	100

BN	JUMLAH
	8+(4+5+6+7)
285.000	22.903.920
843.432	172.514.500
371.050	37.857.791
	511.507
100.551	238.406.895

TOTAL
238.406.895
100,00 %
22.571.627
100,00 %

menyajikan hasil dengan nilai

Tabel 7.

CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA BIDANG KESEHATAN

NO	INDIKATOR	PURBALINGGA		SPM NAS
		2001	2006	
1.	Umur Harapan Hidup (tahun)	65.6	69.5	69
2.	Angka Kematian Bayi / 1.000 KH	10.0	7.4	32
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	143.0	109.0	307
4.	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	13.8	0.7	<15
5.	Universal Child Immunization / UCI (%)	-	77.0	100
6.	Balita Gizi Buruk Dapat Perawatan	100%	100%	100
7.	KLB Yang Ditangani < 24 jam (%)	100%	100%	100
8.	Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (%)	-	72.0	90
9.	Cakupan Rumah Tangga Sehat (%)	-	72.5	65
10.	Cakupan Penduduk Peserta JPK (%)	35.0	73.5	80

Tabel 8.

FIGUR ANGGARAN PEMBANGUNAN DI PURBALINGGA APBD TAHUN 2007

NO.	BIDANG	TOTAL BELANJA		BELANJA LANGSUNG	
		Rp.	%	Rp.	%
1	Pendidikan	255.256.627.000	40.67	59.249.428.000	19.09
2	Kesehatan	83.250.351.000	13.26	52.113.420.000	16.79
3	Ekonomi	47.692.078.000	7.59	29.740.816.000	9.58
4	Pembangunan Perdesaan	38.070.179.000	6.06	36.943.420.000	11.90
5	Infrastruktur	71.985.967.000	11.46	64.625.118.000	20.82
6	Pemerintahan Umum	131.763.587.000	20.98	67.657.268.000	21.80
	Jumlah	628.018.789.000	100	310.329.470.000	100

C. HASIL PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI

Keberhasilan pembangunan di bidang Perekonomian juga mengacu kepada beberapa

parameter yang telah disusun oleh bidang yang bersangkutan.

Tabel 9.

CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA BIDANG EKONOMI

INDIKATOR	CAPAIAN PURBALINGGA		RPJM NAS 2009
	2001	2005	
• PERTUMBUHAN EKONOMI ( PERSEN )	2,98	4,18	7,6
• PENDAPATAN PER KAPITA (JUTA RP.)	1,89	2,82	-
• PARITAS DAYA BELI MASYARAKAT	549,20	586,60	-
• PDRB HARGA KONSTAN (TRILYUN)	1,66	1,92	-
• PDRB HARGA BERLAKU (TRILYUN)	1,84	2,91	-
• INDEKS GINI	0,21	0,25	-
• PENDUDUK MISKIN → BKKBN ( % )	39,73	34,78	8,2
• PENGANGURAN TERBUKA ( % )	3,81	3,41	5,1

SIMPULAN

Mengacu kepada hasil-hasil yang telah disajikan serta diskusi dengan bupati serta seorang staf bidang pembangunan, maka ada

2 butir temuan penting yang patut dipelajari sebagai *lessons learned*:

1. Satu langkah kebijakan yang menarik untuk disimak adalah disusunnya suatu DAU/

ADD Desa. Langkah ini memungkinkan masuknya uang ke desa sebagai bagian dari pemugaran rumah penduduk tak layak huni, perbaikan jalan desa, perbaikan irigasi desa, dan sekolah-sekolah yang ada. Langkah ini ternyata mampu memacu swadaya masyarakat desa. Kebijakan ini menyebabkan berjalannya aktifitas ekonomi desa secara perlahan tapi pasti dengan akselerasi dari waktu ke waktu. Dampak berikutnya adalah meningkatkan daya beli masyarakat setempat secara perlahan tapi pasti.

2. Langkah penting lain adalah upaya untuk tidak membuat masyarakat bersikap "krida lumahing asta" (menerima pemberian tanpa bekerja atau berupaya). Disusun suatu gerakan atau konsep "Work for Food", yakni diadakannya berbagai kegiatan pembangunan berbasis padat karya bagi mereka yang tak mempunyai pekerjaan. Bentuk bayaran atau kompensasi yang diberikan adalah in natura dalam hal ini beras. Dengan pendekatan ini, masyarakat miskin dididik untuk tidak berbudaya menerima bantuan cuma-cuma/gratis secara terus-menerus tapi mau bekerja untuk mendapatkan bantuan.
3. Langkah ketiga yang patut dimunculkan dalam studi ini adalah "pendidikan" keluarga mampu untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa masing-masing dengan stimulan berupa dana terbatas untuk perbaikan sarana - prasarana desa. Selain itu diwujudkan dalam bentuk Subsidi Silang dalam program JPKM, yakni yang merasa mampu mensubsidi yang tidak mampu. Strategi sekolah atau pengobatan gratis tidak berlaku untuk semua, hanya berlaku bagi keluarga miskin/tidak mampu yang memenuhi kriteria tertentu..

## REKOMENDASI

1. Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat harus dimulai dari tingkat Desa.
2. Pembangunan harus mampu membawa masyarakat miskin untuk tidak lagi bersikap Kridha Lumahing Asta.
3. Konsep *Work for Food* (konsep Roosevelt yang berhasil membawa Amerika Serikat keluar dari depresi besar) harus diterapkan untuk memacu lapangan kerja dan ekonomi di tingkat desa.
4. Program dana bergulir yang diperuntukkan bagi masyarakat harus sampai dan tepat pada sasarannya serta harus dilakukan dalam pelayanan satu pintu *one stop service*.
5. Para pengambil kebijakan di tingkat daerah harus berani melakukan terobosan-terobosan program pelayanan yang cepat, efektif dan efisien serta memperpendek birokrasi perijinan dan investasi.
6. Konsep JPKM yang bersifat subsidi silang dapat dilaksanakan di tingkat desa asalkan pemerintah daerah memiliki kemampuan kontrol yang tepat dengan didukung data yang akurat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Purwanto, Widi, 2006. Untukmu Purbalingga. Phibeta Aneka Gama, Jakarta
- Setyoko, JC dan Prasetyo, Patriana, Yudhia (editor). 2007. Pendopo Untuk Rakyat, Pemkab Purbalingga.

MER

## LATAR BELA

**P**endidikan dalam manus

mampu meng dan menda layak pula seh kehidupan yan saat ini semak mampu meny tu bagi anak-dikan merupa pendidikan m pemecahan kenyataannya an sering m namun belum terprogram se

Data di B sebagian bes penyebab uta melanjutkan s nomi, yang b sekolah (67,0 cari nafkah ( pemerintah j nuhi alokasi gaji guru. Bal tusi menyata komponen dalam APBN (semu) aloka menjadi 18% amanat UU S menambah 2

Memperh Dewan Rise institusi yang *think-thank* untuk menc kepentingan Daerah Jaw garakan rou **Merencana an di Jau** sudkan mar kebijakan p